



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.9,2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang Selatan
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan tugas penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
10. Pembangunan Daerah adalah upaya terencana dalam mencapai tujuan bernegara yang dilaksanakan oleh semua komponen pelaku pembangunan daerah.
11. Pelaku pembangunan daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Tangerang Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Tangerang Selatan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Tangerang Selatan.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan RPJMD Kota Tangerang Selatan dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.
- (2) Penetapan RPJMD Kota Tangerang Selatan mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sekitar.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD Kota Tangerang Selatan merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD Kota Tangerang Selatan;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

Pasal 5

Uraian sistematika RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan, maka penetapan perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011-2016, maka untuk mengukur capaian kinerja menggunakan indikator RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011-2016.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kota Tangerang Selatan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD Kota Tangerang Selatan transisi dengan menyusun indikasi program untuk menjadi rancangan awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, guna menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2022 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Oktober 2016

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN : (6,56/2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota yang memuat Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tangerang Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota yang disusun berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang Selatan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah dan Kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Tangerang Selatan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Tangerang Selatan pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kota Tangerang Selatan meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, serta tujuan dan sasaran dari prioritas pembangunan yang akan dicapai.

- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan.
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah, program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada awal sampai dengan akhir periode perencanaan.
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kota Tangerang Selatan.
- BAB XI : PENUTUP
Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan transisi adalah sisa waktu masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 yang belum tersusun RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026 dengan cara menyusun indikasi program sebagai rancangan awal RPJMD 2021-2026.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 73